WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

(2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

(3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

(1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

(2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;

e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;

f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;

h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;

i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;

k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;

l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;

n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;

o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;

p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;

r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;

t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;

u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;

v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;

w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;

z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;

aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;

bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;

cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan

dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025 disusun dengan prinsip–prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana untuk tahun 2025;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar bagian maupun bagian dengan perangkat daerah lainnya.

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025;
- Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025; serta
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025, dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 serta prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2025 dan rencana tindak lanjut LKj IP Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Sub Bab ini disajikan Review atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2023) dan perkiraan pencapaian realisasi Rencana Kerja pada tahun berjalan (2024) sesuai dengan APBD Tahun 2024. Berkenaan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah didasarkan pada realisasi atas Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2 Tahun Rencana) dan 2024 (n-1 Tahun Rencana) relatif sama, namun dalam sub kegiatan atau aktivitasnya dimungkinkan ada perbedaan. Program yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	BAGIAN PEMERINTAHAN									
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3538) Nilai	Sedang (3,06) Nilai	Sangat Tinggi (3,3532) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,12	Sangat Tinggi (3,3534) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,11
	Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	100 %	47,62 %	57,14 %	90,48 %	158,35 -	71,43 %	71,43 %	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.04.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	21 kelurahan	18 kelurahan	21 kelurahan	116,67	19 kelurahan	19 kelurahan	90,48
2.13.04.02.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	-	21 dokumen	21 dokumen	100,00	21 dokumen	21 dokumen	100,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
	Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,25 indeks	84,88 indeks	84,89 Indeks	85,15 Indeks	100,31	83,85 Indeks	85,15 Indeks	101,55
	Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100,00
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	24 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	100,00	6 Rumusan Kebijakan	18 Rumusan Kebijakan	75,00
4.01.02.02.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 Dokumen	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00	25 Dokumen	50 Dokumen	50,00
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3536) Nilai	Sedang (3,06) Nilai	Sangat Tinggi (3,3532) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,12	Sangat Tinggi (3,3534) Nilai	Tinggi (3,4243) Nilai	102,11
	Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	66,67 %	83,33 %	83,33 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %	66,67 %	83,33 %	83,33 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	40 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	20 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	10 Dokumen	50,00
4.01.02.02.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	8 Dokumen	50,00
4.01.02.02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %	83,33 %	83,33 %	83,33 %	100,00	83,33 %	83,33 %	100,00
4.01.02.02.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	32 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	16 Dokumen	50,00
	BAGIAN HUKUM									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	112,86 %	100 %	122,86 %	122,86	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	131,23 %	100 %	134,01 %	134,01	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1280 Dokumen	-	320 Dokumen	438 Dokumen	136,88	320 Dokumen	758 Dokumen	59,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	16 Kasus	-	4 Kasus	4 Kasus	100,00	4 Kasus	4 Kasus	50,00
4.01.02.02.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	280 Dokumen	-	70 Dokumen	86 Dokumen	122,86	70 Dokumen	156 Dokumen	55,71
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	18 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	100,00	4 rumusan kebijakan	12 rumusan kebijakan	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.02.02.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.02.02.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.03.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	24 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	100,00	6 rumusan kebijakan	18 rumusan kebijakan	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.02.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03.02.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	50,00
4.01.03.02.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	16 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	8 Dokumen	50,00
4.01.03.02.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	90 %	0 %	82,5 %	84 %	101,82	-	84 %	93,33
4.01.03.02.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*	90 %	31,4 %	50 %	25 %	50,00	63,33 %	50,33 %	55,92
4.01.03.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	40 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	100,00	10 bahan kebijakan	30 bahan kebijakan	75,00
4.01.03.02.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.03.02.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	54 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100,00	16 Laporan	32 Laporan	59,26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.02.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK Nilai (84,00)	BAIK Nilai (82,84)	BAIK Nilai (82)	BAIK Nilai (85,99)	104,87	BAIK Nilai (82,5)	BAIK Nilai (86)	102,38
		Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	9/9 Nilai	4/9 Nilai	5/9 Nilai	8/9 Nilai	160,00	6/9 Nilai	9/9 Nilai	100,00
4.01.03.02.02.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	320 Dokumen	-	80 Dokumen	40 Dokumen	50,00	80 Dokumen	120 Dokumen	37,50
4.01.03.02.02.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.03.02.02.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100,00	300 Orang	600 Orang	50,00
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	BB Nilai (75,50)	BB Nilai (73,73)	BB Nilai (73,74)	BB Nilai (74,79)	101,42	BB Nilai (74,00)	BB Nilai (75,00)	99,34
		3. Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan *"Good Governance"*	66,67 %	-	-	-	-	33,33 %	33,33 %	49,99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100 %	76,67 %	76,67 %	80,00 %	104,34	76,77 %	80,00 %	80,00
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100 %	76,67 %	65,52 %	80 %	122,10	75,86 %	80,00 %	80,00
4.01.03.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	23 OPD	22 OPD	24 OPD	109,09	24 OPD	24 OPD	80,00
4.01.01.02.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.01.02.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
	Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87,00) Nilai	Baik (84,50) Nilai	Baik (84,50) Nilai	Baik (85,60) Nilai	101,30	Baik (84,00) Nilai	Baik (86,86) Nilai	99,84
		2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	50 %	-	-	-	-	25 %	25 %	50,00
	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100 %	100 %	27,59 %	30,00 %	108,74	100 %	100 %	100,00
		2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	25 %	-	-	-	-	25 %	25 %	50,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	48,28 %	24,14 %	27,59 %	13,33 %	48,31	34,48 %	30 %	62,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	23 OPD	22 OPD	24 OPD	109,09	24 OPD	24 OPD	80,00
4.01.01.02.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	10 Laporan	50,00
4.01.01.02.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	50,00
		3. Nilai rata-rata SKM Setda	Sangat Baik (90,00) Nilai	Sangat Baik (91,69) Nilai	Baik (87,00) Nilai	Baik (86,02) Nilai	98,87	Sangat Baik (88,32) Nilai	Sangat Baik (89,00) Nilai	98,89
	BAGIAN UMUM									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	50,00
4.01.01.02.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Laporan	50,00
4.01.01.02.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
4.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	32 Unit	-	29 Unit	29 Unit	100,00	-	29 Unit	90,63
4.01.01.02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	210 Unit	-	26 Unit	26 Unit	100,00	1 Unit	27 Unit	12,86
4.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	75,00
4.01.01.02.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	-	48 Laporan	48 Laporan	100,00	48 Laporan	96 Laporan	50,00
4.01.01.02.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	12 Laporan	50,00
4.01.01.02.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	100,00	13 Laporan	26 Laporan	50,00
4.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara seuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	4 Unit	50,00
4.01.01.02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	260 Unit	-	65 Unit	65 Unit	100,00	65 Unit	130 Unit	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	-	40 Unit	40 Unit	100,00	118 Unit	158 Unit	52,67
4.01.01.02.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100,00	-	1 Unit	33,33
4.01.01.02.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	8 Unit	50,00
4.01.01.02.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ bulan	-	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100,00	2 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	92 Paket	-	23 Paket	23 Paket	100,00	23 Paket	46 Paket	50,00
4.01.01.02.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	-	2 Orang	2 Orang	100,00	2 Orang	4 Orang	50,00
4.01.01.02.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ bulan	-	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	100,00	2 Orang/ bulan	4 Orang/ bulan	50,00
4.01.01.02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8 Paket	50,00
4.01.01.02.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	8 Paket	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	24 Paket	50,00
4.01.01.02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	80 %	80 %	80 %	100,00	80 %	80 %	100,00
4.01.01.02.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	132 Laporan	-	33 Laporan	31 Laporan	93,94	33 Laporan	64 Laporan	48,48
4.01.01.02.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1600 Laporan	-	400 Laporan	439 Laporan	109,75	400 Laporan	839 Laporan	52,44
4.01.01.02.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12220 Laporan	-	3055 Laporan	2624 Laporan	85,89	3055 Laporan	5679 Laporan	46,47
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	2 Laporan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai (90,00)	A Nilai (85,29)	A Nilai (87,00)	A Nilai (85,55)	98,33	A Nilai (88,00)	A Nilai (86,00)	95,56
	Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai (90,00)	A Nilai (85,29)	A Nilai (87,00)	A Nilai (85,55)	98,33	A Nilai (88,00)	A Nilai (86,00)	95,56
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK Nilai (90,00)	SANGAT BAIK Nilai (91,69)	BAIK Nilai (87,00)	BAIK Nilai (86,02)	98,87	BAIK Nilai (88,32)	BAIK Nilai (89,00)	98,89
4.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	20 Dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	12 Dokumen	50,00
4.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.02.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	12 Paket	50,00
4.01.01.02.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	336 Orang	-	84 Orang	84 Orang	100,00	84 Orang	168 Orang	50,00
	BAGIAN UMUM									
4.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00	1 Paket	3 Paket	60,00
4.01.01.02.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	-	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	14 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	6 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	680 Paket	-	170 Paket	177 Paket	104,12	170 Paket	347 Paket	51,03
4.01.01.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100,00	2 Paket	4 Paket	50,00
4.01.01.02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	24 Dokumen	48 Dokumen	50,00
4.01.01.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	-	130 Laporan	130 Laporan	100,00	130 Laporan	260 Laporan	50,00
4.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang / bulan	-	84 Orang/ bulan	84 Orang / bulan	100,00	84 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	50,00
4.01.01.02.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	8 Laporan	50,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Jika disandingkan dengan pencapaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 maka dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.1.2
Ketercapaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Urusan / Perangkat Daerah	Uraian Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)
1	URUSAN PENUNJANG/ SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	104,57%	8	104,25%	100,31%
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	83,33%	6	111,20%	74,94%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4	87,89%	14	100,31%	87,61%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	277,08%	1	116,67%	237,49%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023, yang tercapai sesuai target atau melebihi target ada 2 (dua) Program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Administrasi Pemerintahan Desa. Sedangkan yang kurang dari target ada 2 (dua) program, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian masing-masing sebesar 83,33% dan 87,89%, dengan permasalahan-permasalahan antara lain:
   a. Program Perekonomian dan Pembangunan
      - Belum/rendahnya kontribusi BUMD dalam memberikan pendapatan daerah
      - Aplikasi dari LKPP sering error (SIRUP, LPSE, Katalog dan SIKAP) sehingga menghambat proses PBJ
      - Pada paket pekerjaan konstruksi, perencanaan juga dilaksanakan pada tahun berjalan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lambat menunggu perencanaan selesai
      - Revisi Dokumen perencanaan PBJ yang telah direviu oleh UKPBJ lambat dikembalikan oleh PD
      - Adanya kebijakan peningkatan transaksi PBJ melalui katalog lokal sehingga PBJ melalui tender / tender cepat / seleksi berkurang paketnya dan beralih ke katalog lokal

   b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
      - Belum adanya reward and punishmet terhadap penerapan RB
      - Adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda di tahun 2023 (RB general dan RB Tematik) yang disertai regulasi yang berubah-ubah dalam implementasinya
      - Keterbatasan pemahaman PD tentang perlunya reviu SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
      - Penyusunan SKM PD belum sepenuhnya berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
      - Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah
      - Adanya kebijakan perubahan nama jabatan yang tidak diikuti dengan Anjab, ABK, SKJ dan Evjab
      - Pemahaman tentang budaya kerja BerAKHLAK kurang massif dilakukan diseluruh perangkat daerah
      - Waktu penyelesaian pelayanan surat menyurat tergantung pada agenda pimpinan
      - Banyaknya permintaan pelayanan dari PD yang tidak sesuai standar dan tidak masuk dalam perencanaan
      - Sarana dan prasarana fasilitasi keprotokolan belum sesuai standar baik jumlah maupun jenisnya
      - Indikator survey kepuasan masyarakat yang perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan di Sekretariat Daerah yaitu persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan dan kompetensi pelaksana

Melihat berbagai permasalahan-permasalahan diatas, maka pada tahun 2025 perlu dilakukan langkah perbaikan atau strategi dan kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan
   - ✓ Mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar

- ✓ Menetapkan perjanjian kinerja dan memonev secara berkala atas capaian kinerja BUMD
- ✓ Mengintensifkan klinik konsultasi pada BLP agar hambatan-hambatan dalam permasalahan PBJ dan implementasi kebijakan dari pusat segera dapat dicarikan solusi

Sedangkan kebijakan pencapaian target kinerja penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan difokuskan pada:

1. Restrukturisasi organisasi BUMD
2. Penetapan *Roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
3. Penetapan kebijakan penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
4. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

b. Strategi meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

- ✓ Pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja
- ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
- ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
- ✓ Pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

Sedangkan kebijakan pencapaian target kinerja penyelenggaraan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada:

1. Kebijakan pemberian *reward and punishmet* terhadap penerapan RB
2. Perubahan kebijakan penerapan SAKIP dan RB menyesuaikan dengan kebijakan diatasnya
3. Kebijakan pelaksanaan reviu SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Laporan SKM Perangkat Daerah berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
5. Kebijakan menciptakan inovasi perangkat Daerah 1 atau 2 inovasi setiap tahun

2. Dari total 22 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2023 semuanya mencapai target atau melebihi target kegiatan. Kedepan tetap perlu dilakukan langkah membuat perencanaan anggaran dan kinerja lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Terdapat 5 Kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni:
   1. Kegiatan Pembiayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      Capaian kegiatan pembiayaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa sebesar 116,67% dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam mewujudkan administrasi pemerintah desa yang baik.
   2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Capaian kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum sebesar 134,01% dipengaruhi komitmen personil pelaksana yang sangat baik, adanya penambahan personil dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi, dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dengan stakeholder terkait, serta adanya digitalisasi pengusulan produk hukum dari masing-masing perangkat daerah sehingga mempercepat proses penyusunan produk hukum.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   Capaian kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 104,87% disebabkan tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, responsif terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar PD intensif dilaksanakan, dan percepatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan melaksanakan pendampingan kepada PD.
4. Kegiatan Penataan Organisasi
   Capaian kegiatan penataan organisasi sebesar 109,09% dikarenakan koordinasi yang baik dengan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta lintas PD, Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, kolaborasi antar PD dan lintas sektor untuk pencapaian kinerja instansi pemerintah, serta integrasi aplikasi manajemen kinerja

3. Dari total 62 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah rata-rata mampu memenuhi target yang ditetapkan meskipun ada 2 yang tidak terpenuhi, yaitu Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan capaian sebesar 85,89% dan Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan capaian sebesar 93,94% karena belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda, belum termanfaatkannya sukma-e Jatim secara maksimal oleh pengguna layanan, serta kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan.
   Melihat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah perbaikan diantaranya sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan sukma-e jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait, serta optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan selain mempunyai indikator kinerja utama dalam mencapai kinerja organisasi maka berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	IKK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	IKK	1,13%	1,15%	1,17%	1,19%	1,20%	0,80%	49,40%	76,41 %	52,02 %	50,82%	- Realisasi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami perubahan kebijakan penghitungan dimana pada tahun 2022 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi dan tender cepat, sedangkan mulai tahun 2023 data pengadaan yang dihitung metode kompetitif meliputi: tender, seleksi, tender cepat, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan dikecualikan - Proyeksi penurunan realisasi tahun 2025 dan 2026 dari tahun 2024 disebabkan adanya kebijakan konsolidasi paket pengadaan yang sejenis

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	IKK	98,80 %	98,85 %	98,90 %	98,95%	99,00%	87,39%	90,99%	87,50%	89,00 %	92,00%	Ketidaktercapaian target 100% disebabkan Perangkat Daerah kurang tertib mencatatkan/upload bukti dukung relisasi PBJ di LPSE
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	IKK	95,00 %	61,00 %	83,00 %	85,00%	86,00%	94,11%	94,50%	67,00 %	78,00 %	81,00%	Alat ukur yang digunakan untuk menghitung capaian PDN yaitu aplikasi p3dn.sipd mulai bulan Oktober 2023 sudah tidak bisa diakses sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk menghitung secara pasti realisasi PDN di tahun selanjutnya
5	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	IKU	55.17 %	65.52 %	76,77 %	86,21 %	100%	76.67%	80,00 %	80,00%	80,00%	80,00%	Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi mengamanatkan bahwa evaluasi RB terdiri dari RB General dan RB Tematik sehingga fokus evaluasi tidak sama dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun untuk mengatasi hal tersebut, fokus perhitungan capaian indikator PD Kota Blitar diperoleh dari PD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan Tematik tahun 2024, sejumlah 24 PD dari total 30 PD yang ada.

No	Indikator Kinerja	IKK/IKU	Target Renstra Sekretariat Daerah/RPJMD Kota Blitar					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target rumusan kebijakan pemerintahan sebanyak 2 (dua) rumusan/menyesuaian setiap tahunnya ditambah dengan 6 (enam) rumusan kebijakan perekonomian rutin setiap tahunnya dan 4 (empat) rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat rutin setiap tahunnya akan diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan
7	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari target rumusan kebijakan administrasi pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) rumusan rutin setiap tahunnya akan diupayakan selalu diimplementasikan keseluruhan sesuai target yang ditetapkan

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Dari indikator kinerja tersebut diatas, berdasarkan penetapan kinerja utama perangkat daerah sesuai RPJMD Kota Blitar 2021-2026 ada 3 (tiga) indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Sekretariat Daerah mendukung *Misi ke 1* "Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan", *Tujuan ke 1* "Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis", *Sasaran ke 1* "Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama" dan *Misi ke 5* "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi", *Tujuan* "Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi ", *Sasaran ke 1* "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah". Dimana jika target kinerja pada Sekretariat Daerah tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar yaitu Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Status EKPPD serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain :

a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan dan keagamaan
   a) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   b) Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   c) Belum optimalnya implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   d) Belum tersedianya road map penanganan kemiskinan yang selaras dengan program perlindungan sosial
   e) Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama

b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
   1. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   2. Belum/rendahnya kontribusi BUMD dalam memberikan pendapatan daerah
   3. Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa
   4. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

c. Isu terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
   1. Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi dan SAKIP secara menyeluruh
   2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN ber-AKHLAK

d. Isu terkait peningkatan kualitas pelayanan publik
   1. Belum optimalnya pemberian pelayanan sesuai standar
   2. Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI guna mendukung digitalisasi tata kelola arsip pemerintahan
   3. Budaya menciptakan inovasi guna efisiensi pelayanan

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu upaya:
   a) Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren serta melaksanakan monev dampak program RT Keren secara berkala oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota
   b) Menyusun database bidang kesejahtaraan sosial dan masyarakat yang sistematis dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan
   c) Peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi, pendampingan dan monev penyusunan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah sehingga bisa mengarah ke penerapan Undang-Undang Cipta Kerja
   d) Menyusun road map penanganan kemiskinan yang selaras dengan program perlindungan sosial

2. Dalam mewujudkan penyelenggaraan perekonomian, administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik maka perlu dilakukan:
   a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Kebijakan Daerah
   b. Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: Rebranding Tata Kelola BUMD, Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 serta Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
   c. Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar serta Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar
   d. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
   e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE
   f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan PD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN

3. Dalam meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya:
   a) Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja
   b) Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis

4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah maka perlu dilakukan:
   a. Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   c. Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi;
3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup;
5. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;

6. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi, maka Sekretariat Daerah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAGIAN PEMERINTAHAN				1.821.570.658	BAGIAN PEMERINTAHAN				2.555.555.870	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				108.146.500	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.636.270	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				108.146.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				196.636.270	
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 %	108.146.500	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	85,71 %	196.636.270	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurahan	108.146.500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	20 kelurahan	196.636.270	
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	108.146.500	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	196.636.270	Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk fasilitasi lomba kelurahan
II	UNSUR PENDUKUNG				1.713.424.158	UNSUR PENDUKUNG				2.358.919.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PEMERINTAHAN					
A	SEKRETARIAT DAERAH				1.713.424.158	SEKRETARIAT DAERAH				2.358.919.600	
I.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	1.713.424.158	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	2.358.919.600	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	1.051.112.658	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	2.358.919.600	
			Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan	100 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			umum yang terfasilitasi					umum yang terfasilitasi			
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 %		
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	252.794.200	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	562.638.900	- Penyesuaian pagu untuk fasilitasi dan koordinasi lintas sektor - Perlunya anggaran jasa konsultansi penyusunan kebijakan rupabumi
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	643.624.958	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	858.664.700	- Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Evdeskel - Terdapat anggaran program prioritas RT Keren berupa

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											pendampingan, monev dan RT Keren Award
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	154.693.500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	704.007.300	- Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	662.311.500	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	233.608.700	
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	662.311.500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	233.608.700	
	BAGIAN HUKUM				765.139.900	BAGIAN HUKUM				660.139.700	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				765.139.900	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.139.700	
	SEKRETARIAT DAERAH				765.139.900	SEKRETARIAT DAERAH				660.139.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	765.139.900	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	660.139.700	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	765.139.900	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	660.139.700	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	312.338.600	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	221.168.200	
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	271.810.700	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	190.013.500	
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	180.990.600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	248.958.000	Perlu adanya penganggaran updating JDIH guna meningkatkan kualitas Pendokumentasian Produk Hukum dan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pengelolaan Informasi Hukum
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.647.673.520	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.014.621.767	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9.647.673.520	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				10.014.621.767	
	SEKRETARIAT DAERAH				9.647.673.520	SEKRETARIAT DAERAH				10.014.621.767	
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	8.749.278.500	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	9.196.827.200	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Kebijakan	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	8.749.278.500	Pelaksanaan Kebijakan	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan	6 Rumusan Kebijakan	9.196.827.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesejahteraan Rakyat		kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti			Kesejahteraan Rakyat		kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti			
			Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan				Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan		
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8.531.039.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8.979.252.900	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan
1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	2 Dokumen	114.023.300	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	2 Dokumen	122.240.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	104.215.700	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, PerpustakaaN, Kearsipan,	2 Dokumen	95.333.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Trantibum Linmas			
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	898.395.020	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	817.794.567	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	631.438.400	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	219.376.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	215.867.767	
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	220.108.200	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	218.140.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	191.954.200	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	183.786.800	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	266.956.620	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	200.000.000	
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	266.956.620	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	200.000.000	
	BAGIAN UMUM				26.170.548.770	BAGIAN UMUM				25.844.539.541	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				26.170.548.770	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				25.844.539.541	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				26.170.548.770	SEKRETARIAT DAERAH				25.844.539.541	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	26.170.548.770	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	25.844.539.541	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	11.158.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.100.000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	11.158.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	12.540.692.028	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	13.974.748.327	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	12.531.347.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	13.970.898.327	Menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan gaji, tunjangan dan adanya penambahan gaji tenaga P3K
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se	4 Laporan	9.345.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4 Laporan	3.850.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			mesteran SKPD					Semesteran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	9.450.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	4.950.000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.210.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.750.000	
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD tidak diambil pada Renja 2025
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.200.000	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1.060.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	700.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.060.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	700.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.684.822.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.436.416.400	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.986.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.912.200	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	204.170.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	108.346.900	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	40.479.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	31.781.900	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	818.806.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	773.355.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.643.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.698.700	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	64.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	48.600.000	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	407.937.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	382.721.700	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	90.239.428	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	22.205.800	
6.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tidak diambil pada Renja 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	90.239.428	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	22.205.800	
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.338.604.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.068.456.000	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	437.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	441.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	1.049.261.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	48 Laporan	864.885.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Air dan Listrik yang Disediakan					Air dan Listrik yang Disediakan			
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	30.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12.000.000	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.258.306.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.191.130.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.646.655.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.461.992.800	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	455.630.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	455.618.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	503.228.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	495.752.600	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak diambil pada Renja 2025
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 unit	237.929.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 unit	163.157.500	
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud tidak diambil pada Renja 2025
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	449.868.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	347.464.000	Target menyesuaikan dengan kebutuhan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
8.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	Sub Kegitan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak diambil pada Renja 2025
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923.716.314	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923.673.914	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178.952.314	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178.952.314	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138.764.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138.721.600	
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.000.000	
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	3.193.549.400	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	3.093.126.500	
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.564.818.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.514.704.900	
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.332.649.100	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.282.342.400	
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	296.081.900	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	296.079.200	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	1.730.600.600	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	857.168.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	1.459.152.300	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	717.500.000	
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	77.384.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	66.471.000	
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	194.064.300	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	73.197.800	
	BAGIAN ORGANISASI				840.298.873	BAGIAN ORGANISASI				880.299.400	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				840.298.873	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				880.299.400	
	SEKRETARIAT DAERAH				840.298.873	SEKRETARIAT DAERAH				880.299.400	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai	840.298.873	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89) Nilai	880.299.400	
			Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38 %				Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	41,38 %		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21 %				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	86,21 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	15.272.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	15.554.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.119.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.054.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.153.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	151.462.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	118.180.000	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	65.932.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	29.865.400	
2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	85.530.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	88.314.600	
3	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	673.563.673	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	26 OPD	746.565.400	
3.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	172.976.300	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	182.878.800	
3.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	5 Laporan	248.642.540	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	5 Laporan	334.013.100	- Perlu penyusunan hasil SKM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan	Publik dan Tata Laksana				Semua Kelurahan	Publik dan Tata Laksana			Tingkat Pemda semesteran - Perlu fasilitasi ISO bagi PD lokus penilaian Ombudsman
3.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	221.689.500	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	199.571.500	
3.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	18.555.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	16.794.000	
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	11.700.333	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	13.308.000	
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				618.969.100	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				638.969.100	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				618.969.100	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				638.969.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				618.969.100	SEKRETARIAT DAERAH				638.969.100	
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67 %	618.969.100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	76,67 %	638.969.100	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	159.849.100	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	149.597.800	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	36.413.400	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	46.413.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	123.435.700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	103.184.400	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	7 nilai	459.120.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	7 nilai	489.371.300	
			SKM Layanan UKPBJ	83 nilai				SKM Layanan UKPBJ	83 nilai		
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	459.120.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	238.765.100	
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	59.892.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	111.942.200	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan prioritas
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	300 Orang	138.756.600	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	300 Orang	138.664.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Barang dan Jasa					Barang dan Jasa			

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang masuk adalah berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 di 3 (tiga) Kecamatan dimana terdapat beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) tersebut sebagian sudah terwadahi dalam program dan kegiatan yang ada pada RENJA 2025 ini sehingga tidak diperlukan lagi penambahan program dan kegiatan baru. Sedangkan usulan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, telah disampaikan/diteruskan kepada PD teknis.

Disamping DSP dari masing-masing Kecamatan se-Kota Blitar, masih terdapat usulan kegiatan masyarakat yang tergabung dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Blitar. Berdasarkan usulan yang masuk, tidak ada yang harus diakomodir oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2025 ini, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penekanan tema RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, melalui:
   a. Transformasi ekonomi
      - ✓ Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - ✓ Penguatan infrastruktur digital
      - ✓ Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - ✓ Percepatan infrastruktur IKN
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
   SDM berdaya saing dan produktif, melalui:
   a. Transformasi sosial
      - ✓ Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - ✓ Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - ✓ Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
      - ✓ Penetapan penggunaan regsostek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - ✓ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
      - ✓ Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
   b. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
      - ✓ Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui:
      - ✓ Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
      - ✓ Pengembangan skema graduasi bansos
      - ✓ Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
      - ✓ Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
      - ✓ Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
      - ✓ Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
      - ✓ Peningkata produksi industri pengolahan
      - ✓ Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
      - ✓ Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Sedangkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan dalam lima agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial

Arah kebijakan agenda pembangunan transformasi sosial yaitu

(1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui:
   a. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
   b. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
   c. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
   d. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

(2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui:
   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
   b. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *science, technology, engineering, art dan mathematics*
   c. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
   e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
   f. Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja

(3) Perlindungan sosial yang adaptif, melalui:
   a. Satu Sistem Registrasi Ekonomi (Regsostek)
   b. Integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif
   c. Pengembangan ekonomi perawatan untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, kesetaraan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan
   d. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya
   e. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan transformasi ekonomi yaitu

(1) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, melalui:
   a. Penguatan industri dasar
   b. Hilirisasi industri berbasis mineral penting
   c. Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati
   d. Pengembangan industri medium-high technology
   e. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil
   f. Produktivitas UMKM dan koperasi
   g. Pengembangan ekonomi biru
   h. Pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
   i. Peningkatan produktivitas BUMN
   j. Penguatan ekonomi dan keyangan syariah
   k. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
   l. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan
   m. Peningkatan produktivitas sektor pertanian

(2) Penerapan ekonomi hijau, melalui:
   a. Percepatan transisi energi
   b. Ekonomi sirkular industri
   c. Pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
   d. Pengelolaan hutan lestari

(3) Transformasi digital, melalui:
   a. Penguatan fondasi utama transformasi digital
   b. Digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis
   c. Pemerintah digital
   d. Penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital

(4) Integrasi ekonomi domestic dan global, melalui:
   a. Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi
   b. Optimalisasi backbone integrase ekonomi
   c. Perkuatan system logistic nasional
   d. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
   e. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global

(5) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui:
   a. Wilayah metropolitan
   b. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
   c. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

3. Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif melingkupi:

(1) Bidang regulasi, melalui:
   a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi
   b. Penguatan tata kelola regulasi

(2) Pelayanan publik, melalui:
   a. Digitalisasi pelayanan publik
   b. Pengembangan talenta digital pelayanan publik
   c. Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
   d. Perluasan akses pelayanan publik

(3) Proses bisnis dan kelembagaan, melalui:
   a. Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
   b. Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
   c. Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah

(4) Manajemen Aparatur Sipil Negara, melalui:
   a. Transformasi budaya kerja dan kelembagaan manajemen ASN
   b. Penguatan tata kelola ASN
   c. Penggajian tunggal ASN
   d. Reformasi sistem pensiun
   e. Pemberian penghargaan dan pengakuan non material

(5) Pengawasan pembangunan, melalui:
   a. Penyelenggaraan pendidikan anri korupsi pada setiap jejaring pendidikan
   b. Pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga
   c. Pengelolaan gratifikasi dan pemantauan pelayanan publik pemerintah
   d. Perkuatan anti korupsi pada badan usaha
   e. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi dalam mendukung pemberantasan korupsi
   f. Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah
   g. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
   h. Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

(6) Partai politik, melalui:
   a. Penerapan kode etik, demokrasi internal, system kaderisasi dan system rekrutmen
   b. Pengelolaan dan audit keuangan partai politik

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   (1) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial, melalui:
      a. Pembangunan bidang hukum
      b. Pembangunan bidang keamanan
      c. Pembangunan bidang demokrasi
   (2) Stabilitas ekonomi makro
      a. Optimalisasi pendapatan negara
      b. Peningkatan kualitas belanja negara
      c. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
   (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, melalui:
      a. Penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif
      b. Penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan
   (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, melalui:
      a. Penguatan ketahanan keluarga
      b. Peningkatan kesetaraan gender
      c. Perwujudan masyarakat inklusif
   (3) Lingkungan hidup berkualitas, melalui:
      a. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
      b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman
      d. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah
   (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, melalui:
      a. Kemandirian pangan
      b. Peningkatan ketahanan air nasional
      c. Ketahanan energi
   (5) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, melalui:
      a. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
      b. Pembangunan berketahanan iklim.

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Mengacu pada prioritas nasional tahun 2025 yang diampu oleh Sekretariat Daerah yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik” serta melihat isu strategis dan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tribulan II tahun 2024, maka kebijakan dan strategi pembangunan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah meliputi:

1. Transformasi Sosial
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap peningkatan akses kesehatan untuk semua, peningkatan akses pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pelaksanaan inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi ekonomi digital, integrasi ekonomi domestik, serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan tata kelola regulasi, pengembangan dan pemanfaatan jejaring kerjasama antar lembaga, digitalisasi pelayanan publik, perluasan akses pelayanan publik, pemantauan pelayanan publik pemerintah, penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah, penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional, transformasi budaya kerja ASN, penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap pembangunan bidang hukum dan bidang demokrasi
5. Ketahanan Sosial Budaya
   Dengan mengeluarkan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan monev terhadap penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif, penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan serta perwujudan masyarakat inklusif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.2* di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
(Renstra Tahun 2025 – 2026)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	TUJUAN:							
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1) Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2) Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya.	84,89	85,15	85,15	85,20	85,25

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			3) Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4) Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya					
	SASARAN:							
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:							
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja	BB (73,74)	BB (74,79)	BB (74,795)	BB (74,80)	BB (75,50)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD					
		Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan "*Good Governance*"	"*Good governance*" atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara	-	-	33,33%	66,67%	66,67%
	SASARAN:							
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata	76,67%	80,00%	80,00%	86,21%	100%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
		penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik					
	TUJUAN:							
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4243)	Tinggi (3,4250)	Tinggi (3,4260)
	SASARAN:							
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:							
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan	Baik (84,50)	Baik (85,60)	Baik (86,86)	BAIK (86,00)	BAIK (87,00)
		Persentase PD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara	-	-	25%	35%	50%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			langsung maupun tidak langsung					
	SASARAN:							
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	27,59%	30,00%	100%	100%	100%
		Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah	Baik (87,00)	Baik (86,02)	Sangat Baik (89,00)	SANGAT BAIK (89,00)	SANGAT BAIK (90,00)
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna	-	-	25%	25%	25%

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.					
	TUJUAN:							
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (87,00)	A (85,55)	A (86,00)	A (89,00)	A (90,00)
	SASARAN:							
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja	A (87,00)	A (85,55)	A (86,00)	A (89,00)	A (90,00)

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD					

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Mendukung Misi Walikota
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB (Inflasi)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Mendukung Tematik RB (Inflasi)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Mendukung RB General, RB Tematik serta Penerapan SAKIP Pemda dan PD
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Mendukung RB General, RB Tematik serta Penerapan SAKIP Pemda dan PD
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mendukung RB General dan SAKIP
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Mendukung RB General dan RB Tematik (P3DN)
		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Mendukung RB General dan RB Tematik (P3DN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		SKM Layanan UKPBJ	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung RB General dan RB Tematik serta pencapaian IKK
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mendukung RB General dan RB Tematik serta pencapaian IKK
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung pencapaian Tupoksi

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
   Perumusan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi
3. Tahun 2025 adalah tahun Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital dan Investasi dengan tema: *"Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi"*. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada peningkatan pelayanan berbasis digital guna mendukung kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
4. Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap permasalahan atau kekurang berhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun 2023

   Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung tercapainya tema pembangunan 2025, menyusun rencana kerja tahun 2025 dan menguraikan dalam 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 40.919.124.378,00 (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang berasal dari APBD Kota Blitar.

5. Adapun secara garis besar uraian mengenai rencana tindak lanjut perbaikan terhadap permasalahan atau kekurang berhasilan pencapaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun 2023 serta rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta proyeksi tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2023
pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui: • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. Dan Perikanan
		Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: • Rebranding Tata Kelola BUMD • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: • Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan *Economy Branding* Kota Blitar • Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan bimtek dan pendampingan/desk penyusunan RUP kepada PD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan PD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3	Melaksanakan percepatan internalisasi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi” mengingat adanya perubahan kebijakan implementasi RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	
		Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun	
		Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh PD menganggarkan untuk perbaikan layanan	
5	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber: LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar 2023, diolah

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BAGIAN PEMERINTAHAN				2.555.555.870				1.831.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				196.636.270				110.000.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				196.636.270	APBD			110.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Kota Blitar	90,48 %	196.636.270	APBD		100 %	110.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Kota Blitar	21 kelurahan	196.636.270	APBD		21 kelurahan	110.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Dokumen	196.636.270	APBD	Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk fasilitasi lomba kelurahan	21 Dokumen	110.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.358.919.600				1.721.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.358.919.600				1.721.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Blitar	100 %	2.358.919.600	APBD		100 %	1.721.000.000
						Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Kota Blitar	100 %	2.358.919.600	APBD		100 %	1.721.000.000
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi		100 %				100 %	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						daerah yang terfasilitasi							
						Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan		100 %				100 %	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	562.638.900	APBD	- Penyesuaian pagu untuk fasilitasi dan koordinasi lintas sektor - Perlunya anggaran jasa konsultansi penyusunan kebijakan rupabumi	10 Dokumen	255.000.000
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	5 Dokumen	858.664.700	APBD	- Terdapat pengalihan anggaran	5 Dokumen	645.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Administrasi Kewilayahan	Semua Kelurahan				perjalanan dinas Sub Kegiatan Evdeskel - Terdapat anggaran program prioritas RT Keren berupa pendampingan, monev dan RT Keren Award		
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	704.007.300	APBD	Terdapat pengalihan anggaran perjalanan dinas Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	156.000.000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.33 %	233.608.700	APBD		83.33 %	665.000.000
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	8 Dokumen	233.608.700	APBD		8 Dokumen	665.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sama Dalam Negeri	Semua Kelurahan						
					BAGIAN HUKUM				660.139.700				775.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.139.700	APBD			775.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				660.139.700	APBD			775.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Kota Blitar	100 %	660.139.700	APBD		100%	775.000.000
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Kota Blitar	100 %	660.139.700	APBD		100%	775.000.000
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 Dokumen	221.168.200	APBD		320 Dokumen	315.000.000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kasus	190.013.500	APBD		4 Kasus	275.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Dokumen	248.958.000	APBD	Perlu adanya penganggaran updating JDIH guna meningkatkan kualitas Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	70 Dokumen	185.000.000
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				10.014.621.767				10.140.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				10.014.621.767				10.140.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				10.014.621.767				10.140.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	9.196.827.200	APBD		100 %	9.220.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	9.196.827.200	APBD		6 Rumusan Kebijakan	9.220.000.000
						Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		4 Rumusan Kebijakan				4 Rumusan Kebijakan	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	8.979.252.900	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan	25 Dokumen	9.000.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bina Mental Spiritual					priotitas kebutuhan		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	122.240.900	APBD		2 Dokumen	115.000.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	95.333.400	APBD		2 Dokumen	105.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	817.794.567	APBD		100 %	920.000.000
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	APBD		6 Rumusan Kebijakan	640.000.000
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	215.867.767	APBD		2 Dokumen	220.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						BUMD dan BLUD							
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	218.140.000	APBD		2 Laporan	225.000.000
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	183.786.800	APBD		4 Dokumen	195.000.000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	280.000.000
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	280.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
					BAGIAN UMUM				26.169.538.541				26.796.550.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				26.169.538.541				26.796.550.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				26.169.538.541				26.796.550.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	100 %	26.169.538.541	APBD		100 %	26.796.550.000
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Sangat Baik (89,00) Nilai				Sangat Baik (90,00) Nilai	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1.100.000	APBD		100 %	12.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.100.000	APBD		1 Laporan	12.000.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	14.299.748.327	APBD		100 %	13.009.500.000
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang/ bulan	14.295.898.327	APBD	Menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan gaji, tunjangan dan adanya penambahan gaji tenaga P3K	84 Orang/ bulan	13.000.000.000
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	3.850.000	APBD		4 Laporan	9.500.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4.950.000	APBD		100 %	10.000.000
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.750.000	APBD		2 Dokumen	5.500.000
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2.200.000	APBD		2 Laporan	4.500.000
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Kota Blitar	100 %	700.000	APBD		100 %	1.100.000
4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	700.000	APBD		1 Dokumen	1.100.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kota Blitar	100 %	1.436.416.400	APBD		100 %	1.690.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						perangkat daerah sesuai standar							
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	47.912.200	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	1 Paket	75.000.000
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	108.346.900	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	7 Paket	205.000.000
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	31.781.900	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	3 Paket	41.000.000
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Paket	773.355.000	APBD	Target diubah sesuai jumlah aktivitas	170 Paket	819.000.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	43.698.700	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	2 Paket	75.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	48.600.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	24 Dokumen	65.000.000
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Laporan	382.721.700	APBD	Target sesuai dengan jumlah aktivitas	130 Laporan	410.000.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	22.205.800	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan	100 %	90.500.000
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	22.205.800	APBD		1 Unit	90.500.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4.068.456.000	APBD		100 %	4.431.450.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	441.000	APBD		1 Laporan	450.000
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	864.885.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	48 Laporan	1.100.000
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	12.000.000	APBD		6 Laporan	31.000.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	3.191.130.000	APBD	Target sesuai dengan jumlah laporan penyediaan jasa perbulan dikali 13 bulan	13 Laporan	3.300.000.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik	Kota Blitar	100 %	1.461.992.800	APBD		100 %	1.648.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara sesuai standar							
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	455.618.700	APBD		2 Unit	456.000.000
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	495.752.600	APBD		65 Unit	504.000.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Unit	163.157.500	APBD		40 Unit	238.000.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	347.464.000	APBD	Target menyesuaikan dengan kebutuhan	4 Unit	450.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	100 %	923.673.914	APBD		100 %	936.000.000
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	178.952.314	APBD		2 Orang/ Bulan	180.000.000
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	138.721.600	APBD		23 Paket	140.000.000
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	6.000.000	APBD		2 Orang	6.000.000
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	APBD		2 Orang/ Bulan	610.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Kota Blitar	100 %	3.093.126.500	APBD		100 %	3.235.000.000
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.514.704.900	APBD		4 Paket	1.600.000.000
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.282.342.400	APBD		4 Paket	1.335.000.000
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	296.079.200	APBD		12 Paket	300.000.000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Kota Blitar	80 %	857.168.800	APBD		80 %	1.733.000.000
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Laporan	717.500.000	APBD		33 Laporan	1.460.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	66.471.000	APBD		400 Laporan	78.000.000
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3055 Laporan	73.197.800	APBD		3055 Laporan	195.000.000
					BAGIAN ORGANISASI				880.299.400				858.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				880.299.400				858.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				880.299.400				858.000.000
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	Sangat Baik (89) Nilai	880.299.400	APBD		Sangat Baik (90) Nilai	858.000.000
						Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		41,38 %				48,28 %	
						Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		86,21 %				100 %	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	15.554.000	APBD		100 %	21.000.000
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	10.054.000	APBD		10 Dokumen	15.000.000
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	5.500.000	APBD		6 Laporan	6.000.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Kota Blitar	100 %	118.180.000	APBD		100 %	152.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	29.865.400	APBD	Target menyesuaikan dengan kebutuhan	6 Paket	66.000.000
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang	88.314.600	APBD	Anggaran menyesuaiakan dengan kebutuhan	84 Orang	86.000.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar	26 OPD	746.565.400	APBD		30 OPD	685.000.000
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	182.878.800	APBD		6 Dokumen	175.000.000
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	334.013.100	APBD	- Perlu penyusunan hasil SKM Tingkat Pemda semesteran - Perlu fasilitasi ISO bagi PD lokus penilaian	5 Laporan	250.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Ombudsman		
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	199.571.500	APBD		3 Dokumen	225.000.000
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	16.794.000	APBD		3 Dokumen	20.000.000
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	13.308.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
					BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				638.969.100				628.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				638.969.100				628.000.000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				638.969.100				628.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa	Kota Blitar	76,67 %	638.969.100	APBD		90,00 %	628.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						melalui E-Procurement							
						Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	10 bahan kebijakan	149.597.800	APBD		10 bahan kebijakan	163.000.000
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	46.413.400	APBD		6 dokumen	38.000.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	103.184.400	APBD		16 Laporan	125.000.000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Kota Blitar	7 nilai	489.371.300	APBD		9 nilai	465.000.000
						SKM Layanan UKPBJ		83,00 nilai				84,00 nilai	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Dokumen	238.765.100	APBD		80 Dokumen	265.000.000
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	111.942.200	APBD	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan prioritas	2 Dokumen	60.000.000
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	138.664.000	APBD		300 Orang	140.000.000

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2024

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator sasaran strategis melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
   a. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama

2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
   a) Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   b) Mengoptimalkan ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   c) Mengoptimalkan implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   d) Menyusun, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* penanganan kemiskinan
   e) Menyusun, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   f) Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan memonev secara berkala atas kinerja BUMD

3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
   a) Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
   b) Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

4. Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):
   a. Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas (SAKIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja

5. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:
   a. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah
   b. Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah
   c. Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis
   d. Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah

6. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik:
   Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun

7. Nilai rata - rata SKM Setda:
   - ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   - ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   - ✓ Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
   a. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan
   b. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 dimana didalamnya juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai sifat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, kegiatan dalam satu instansi dan kegiatan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun. Upaya optimalisasi kinerja di Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaran pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus dapat mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas peningkatan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaran pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berkembang dan guna menjawab

tantangan pengguna layanan dan stakeholder terkait, Sekretariat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan produk hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *up to date*.
   - ✓ Mengoptimalkan ketersediaan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
   - ✓ Mengoptimalkan implementasi dan monev pelaksanaan program RT Keren
   - ✓ Merumuskan, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* penanganan kemiskinan

2) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perekonomian maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Merumuskan, mensosialisasikan dan memonev secara berkala *roadmap* kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
   - ✓ Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan memonev secara berkala atas kinerja BUMD

3) Dalam mewujudkan administrasi pembangunan yang baik maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa baik dari sisi pelaku usaha, pelaku pengadaan barjas, Pejabat PBJ, kebijakan LPSE, dan SIRUP
   - ✓ Peningkatan implementasi kebijakan P3DN

4) Dalam meningkatkan internalisasi kinerja organisasi maka perlu adanya:
   - ✓ pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam manajemen kinerja

5) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah maka perlu dilakukan upaya:
   - ✓ Mereviu Standar Pelayanan di lingkup Sekretariat Daerah yang didasarkan pada hasil SKM dan diupayakan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
   - ✓ Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
   - ✓ pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah

Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* dan meningkatan kesejahteraan masyarakat.